

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, STRUKTUR KEPEMILIKAN,
DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

*(Studi Pada Perusahaan yang mengikuti Corporate Governance Perception
Index (CGPI) Awards dan Terdaftar di BEI Periode 2018-2023*

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

Kumalawati

NIM : 31401900224

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, STRUKTUR
KEPEMILIKAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE**
*(Studi Pada Perusahaan yang mengikuti Corporate Governance Perception
Index (CGPI) Awards dan Terdaftar di BEI Periode 2018-2023)*

Disusun oleh :

Kumalawati

NIM : 31401900224

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Sultan Agung

Semarang, 28 Agustus 2024

Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211413024

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, STRUKTUR
KEPEMILIKAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE**
*(Studi Pada Perusahaan yang mengikuti Corporate Governance Perception
Index (CGPI) Awards dan Terdaftar di BEI Periode 2018-2023)*

Disusun oleh :
Kumalawati
NIM : 31401900224

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal : 3 September 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211413024

Penguji I

Provita Wijayanti, SE., M.Si., PhD,

Ak., CA, IFP, AWP

NIK. 211415029

Penguji II

Ahmad Hijri Alfian, SE., M.Si

NIK. 211421032

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal : 3 September 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., PhD, Ak., CA, IFP, AWP

NIK. 211415029

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kumalawati

NIM : 31401900224

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul : **Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan yang mengikuti Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards dan Terdaftar di BEI Periode 2018-2023)** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil jiplakan, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 3 September 2024

Yang membuat pernyataan,



(Kumalawati)

NIM. 31401900224

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Anfaal : 46)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan dorongan doa dan motivasi.
- Semua teman dan sahabat tersayang, yang selalu mendorong untuk selalu berkarya dan berprestasi.
- Almamater, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRACT

Tax Avoidance refers to the legal efforts to minimize tax burdens by exploiting weaknesses in tax regulations without violating tax laws. This study aims to examine the influence of Good Corporate Governance (GCG), Ownership Structure, and Leverage on Tax Avoidance. The population of this study includes companies that participated in the CGPI Awards from 2018 to 2023 and are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The sampling method used is purposive sampling, resulting in a sample of 58 observational data points. This is a quantitative study using secondary data. The data will be analyzed using SPSS software version 25. The results of this study indicate that Corporate Governance, Ownership Structure, and Leverage have a significant positive effect on the value of ETR (Effective Tax Rate) as a proxy for Tax Avoidance.

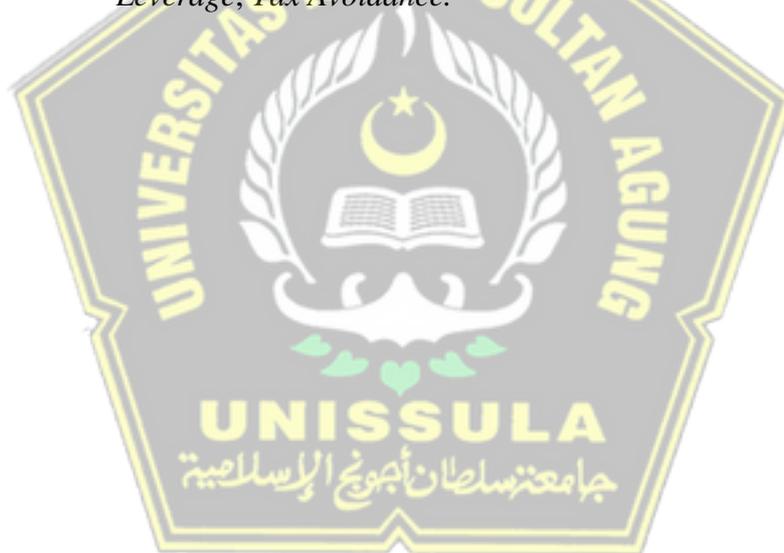
Keywords : *Good Corporate Governance (GCG), Ownership Structure, Leverage, Tax Avoidance.*



ABSTRAK

Tax Avoidance adalah upaya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh GCG, Struktur Kepemilikan dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti *CGPI Awards* periode 2018-2023 dan terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 58 data observasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data tersebut akan dianalisis menggunakan alat bantu *software* SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan dan *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance*.

Kata kunci : *Good Corporate Governance* (GCG), Struktur Kepemilikan, *Leverage*, *Tax Avoidance*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance”***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh derajat Sarjana (S1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan berkat bimbingan, arahan, masukan, dukungan, bantuan, saran dan kritikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., PhD, Ak., CA, IFP, AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan petunjuk dan memotivasi dengan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan arahan untuk membimbing penulis dalam membuat skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak dan Ibu Staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing serta memberikan ilmu pengetahuannya.
5. Kedua orang tua dan adik saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat-sahabat saya Nabila, Meylisa, Elok, April, Seiya, Khaulika, Devilais & Delila yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan penelitian skripsi ini. Penulis berharap bahwa penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 3 September 2024

Penulis



Kumalawati

NIM. 31401900224

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Pertanyaan Penelitian	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Signal (<i>Signaling Theory</i>).....	14

2.2	Variabel Penelitian	15
2.2.1	Tax Avoidance (Y).....	15
2.2.2	<i>Corporate Governance</i> (X ₁).....	17
2.2.3	Struktur Kepemilikan (X ₂)	22
2.2.4	<i>Leverage</i> (X ₃)	24
2.3	Penelitian Terdahulu	25
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	30
2.4.1	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	30
2.4.2	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
2.4.3	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33
2.5	Kerangka Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Populasi dan Sampel	36
3.2.1	Populasi.....	36
3.2.2	Sampel	36
3.3	Sumber dan Jenis Data	37
3.4	Metode Pengumpulan Data	38
3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	38
3.5.1	Variabel Dependen	38
3.5.2	Variabel Independen	39

3.6	Teknik Analisis	45
3.6.1	Statistik Deskriptif	45
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	45
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda	49
3.6.4	Pengujian Hipotesis	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	53
4.2	Deskripsi Sampel Penelitian.....	54
4.3	Analisis Statistik Deskriptif	56
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	57
4.4.1	Uji Normalitas.....	58
4.4.2	Uji Multikolinieritas	59
4.4.3	Uji Heterokedastisitas	60
4.4.4	Uji Autokolerasi.....	61
4.5	Uji Regresi Linear Berganda.....	62
4.6	Pengujian Hipotesis.....	64
4.6.1	Uji t (Parsial).....	64
4.6.2	Uji F (Simultan).....	65
4.6.3	Koefisien Determinasi (R ²).....	66
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.7.1	Pengaruh Corporate Governance (CGPI) terhadap Tax Avoidance	67
4.7.2	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance	68
4.7.3	Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance	69

BAB V KESIMPULAN.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Keterbatasan Penelitian	71
5.3 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2022.....	2
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Index Penilaian GCG menurut IICG.....	40
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian	54
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	56
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> (K-S)	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas dengan Nilai Tolerance dan VIF	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser :	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	62
Tabel 4.8 Hasil Uji F (Simultan).....	65
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Adjusted R Square</i>	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rata – Rata <i>ETR</i> Perusahaan yang terdaftar dalam <i>CGPI Awards</i> Tahun 2018 – 2022	5
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Tabulasi Data Penelitian	76
---	----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara. Partisipasi Wajib Pajak sangat penting agar pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan perekonomian negara dengan baik. Menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi fokus penting bagi pemerintah, mengingat pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak secara aktif berusaha melalui berbagai metode untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal setiap tahunnya.

Berikut data sekunder terkait target dan realisasi pendapatan penerimaan pajak, pada tahun 2018- 2022 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2022

Keterangan	Target (dalam Triliun rupiah)	Realisasi (dalam Triliun rupiah)	Capaian
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%
2022	1.716,80	1.485,00	115,60%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2018 – 2022

Berdasarkan data diatas, baik target maupun realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan sinergi antara peran pemerintah dan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi fokus utama pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak negara secara optimal. Ketika Wajib Pajak mematuhi kewajiban dan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemerintah dapat lebih mudah untuk mencapai target penerimaan pajak, sehingga, negara dapat menjalankan pemerintahan dan perekonomian dengan lebih efektif.

Peraturan perpajakan di Indonesia mewajibkan Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang kepada negara melalui sistem penilaian mandiri atau *Self Assessment System*. Sistem ini diterapkan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan menggunakan *Self Assessment System*, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Namun, penerapan undang-undang perpajakan ini dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak, seperti perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang yaitu dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk beban pajak (Waluyo, 2019).

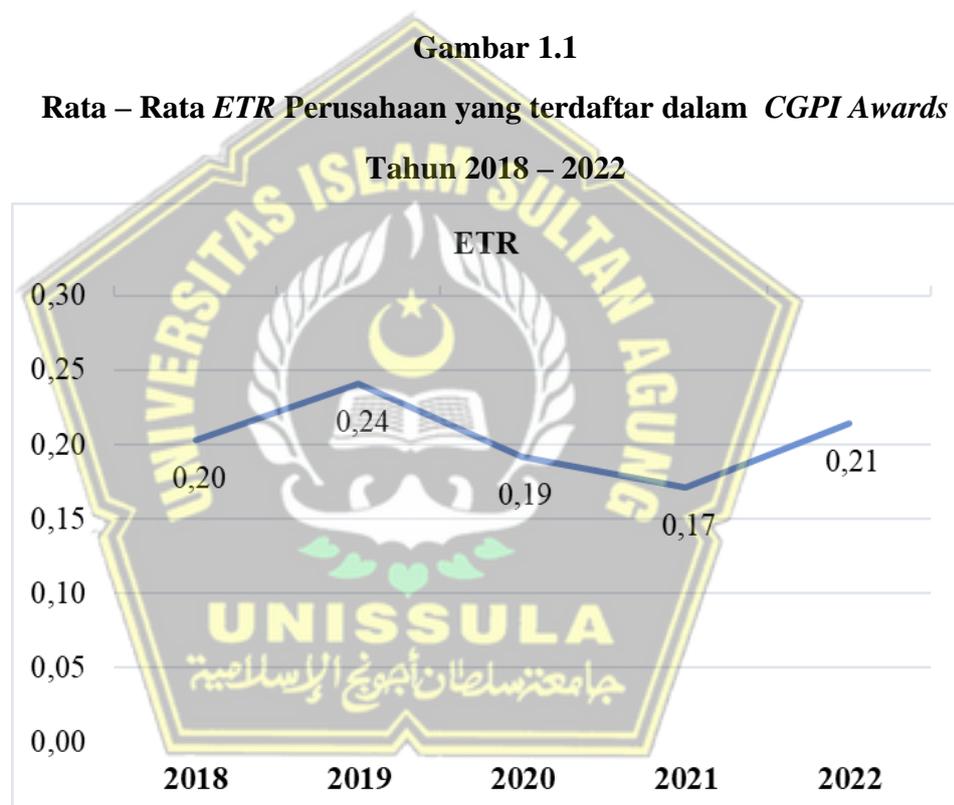
Peraturan perpajakan berlaku untuk semua Wajib Pajak, termasuk badan usaha seperti perusahaan. Perusahaan biasanya memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang besar guna meningkatkan kesejahteraan pemegang saham atau pemilik modal. Kehadiran pajak tentu mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga sering kali perusahaan enggan membayar pajak yang terutang. Namun, pemungutan pajak bersifat wajib atau memaksa yang berarti setiap Wajib Pajak yang berpenghasilan, wajib membayar pajak yang terutang dan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak mengenai pentingnya pajak dalam pembiayaan belanja negara, yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai Wajib Pajak. Perusahaan melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Sebaliknya, pemerintah berupaya dengan berbagai cara untuk memastikan pajak terutang dipungut dari Wajib Pajak agar penerimaan pajak negara terus meningkat, mengingat pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang kepada negara. Salah satu cara yang digunakan perusahaan adalah melakukan praktik *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak. Pajak merupakan

pengurang laba bersih perusahaan, manajer cenderung mengambil tindakan untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan melakukan *tax avoidance* (Fahmi, 2020).

Tax Avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sadar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan celah berupa *grey area*, yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2014). *Tax Avoidance* dianggap sebagai strategi yang efektif bagi perusahaan untuk mengurangi pajak terutang secara sah atau legal, karena dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, praktik *Tax Avoidance* tentu dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara. Praktik *Tax Avoidance* ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan berskala kecil maupun besar tak terkecuali perusahaan *Go Public*. Perusahaan *Go Public* selalu berupaya menunjukkan siklus keuangan yang sehat untuk menarik minat investor. Kemajuan perusahaan tidak hanya tercermin dari siklus keuangannya saja, tetapi juga dilihat dari kemampuan tata kelola perusahaan itu sendiri yang diukur menggunakan index. Dengan demikian, di era sekarang ini banyak perusahaan yang berlomba lomba memaksimalkan system tata kelolanya agar masuk ke dalam deretan perusahaan *CGPI (Corporate Governance Perception Index) Awards*. Namun, dibalik terdaftarnya perusahaan tersebut ke *CGPI Awards*, perusahaan tersebut belum bisa dipastikan telah melaksanakan tata kelola yang

baik termasuk salah satunya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak badan yang baik, atau malah mencari celah untuk meminimalisirkan beban pajak penghasilannya dengan cara memanipulasi. *Tax Avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate*, yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba setelah pajak. Berikut merupakan Rata – Rata ETR Perusahaan yang terdaftar dalam CGPI Awards :



Sumber : www.idx.co.id, data yang diolah 2023

Grafik diatas menunjukkan fluktuasi kadar praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di *CGPI Awards*. Nilai ETR dengan rasio dibawah 1 (satu) mencerminkan tingginya praktik pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sebagaimana angka *ETR* yang tertera pada grafik tersebut

menjelaskan bahwa ternyata perusahaan yang terdaftar dalam *CGPI Awards* pun masih belum mampu melaksanakan tanggung jawabnya yaitu memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan jujur, dimana mereka memilih melakukan praktik penghindaran pajak secara besar – besaran.

Dilansir dari www.pajak.go.id salah satu kasus pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan *Asian Agri Group (AAG)*, yang terdiri dari 14 perusahaan tergabung. Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, memutuskan bahwa *Asian Agri Group* secara sah bersalah atas tindak pidana perpajakan yaitu mengajukan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap. Akibatnya, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,25 triliun, dan *Asian Agri Group* dijatuhkan hukuman dua tahun penjara serta denda pidana sebesar Rp 2,5 triliun.

Pada tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang diduga melakukan praktik *transfer pricing*. PT. Adaro Energy Tbk, diduga memindahkan keuntungan dalam jumlah yang besar dari Indonesia ke perusahaan di negara-negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2017. Akibat praktik tersebut, PT. Adaro Energy Tbk diduga telah membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dalam kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (www.globalwitness.org).

Dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja serta meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *Corporate Governance* (Jalil, 2018). Sumantri et al., (2018) berpendapat bahwa *Corporate Governance* adalah sebuah sistem pengendalian untuk mewujudkan nilai pemegang saham (*Shareholder Value*). Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak Negara Indonesia masih belum optimal. Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi faktor dilakukannya praktik penghindaran pajak. Diantaranya adalah *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan *Leverage*.

Penerapan *Corporate Governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Tentu saja, perusahaan selalu mencari keuntungan besar, tetapi keuntungan besar datang dengan pajak yang tinggi. Beban pajak yang besar memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak dengan risiko rendah. Penelitian yang mendukung bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Arohmah et al., (2019). Hasil penelitian Arohmah et al., (2019) mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, namun tidak dengan Lolyta & Hutabarat (2020) yang menyatakan

bahwa *Corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Struktur kepemilikan terkonsentrasi lebih banyak ditemui dalam ekonomi global termasuk di Indonesia. Struktur kepemilikan di Indonesia yang memiliki sebaran sebanyak 73% berupa struktur kepemilikan keluarga dan 9% berupa kepemilikan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa pemilik perusahaan memegang peranan penting dalam keputusan perusahaan, termasuk untuk terlibat dalam praktik tax avoidance di Indonesia. Struktur kepemilikan di Indonesia terdiri dari struktur kepemilikan keluarga, asing, dan pemerintah. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Sehingga meningkatnya praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan sebagai dasar perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga Struktur Kepemilikan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (Nurmawan, 2022). Adapun Nurmawan (2022) dan Mita Dewi (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun Ikraam & Arianto (2020) berpendapat kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan leverage memiliki tujuan agar keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya tetap (beban tetap). Noviyanti & Muid (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena perusahaan lebih memakai pendanaan dari sisi utang daripada ekuitas. Penyebabnya adalah karena beban bunga yang timbul dari pendanaan berupa utang dapat dikurangkan secara fiskal. Sedangkan, dividen yang timbul dari pendanaan berupa ekuitas tidak dapat dikurangkan. Leverage berpengaruh positif terhadap ETR, yang artinya tingkat penghindaran pajak akan semakin kecil. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba dikarenakan pembayaran beban bunga, maka secara otomatis tingkat penghindaran pajak pun ikut berkurang Arohmah et al., (2019). Hasil penelitian Noviyanti & Muid (2019) menyebutkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Wahyuni & et al, (2019) *Leverage* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Arohmah et al., (2019). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Arohmah et al., (2019) yaitu: (1) penelitian ini menambahkan struktur kepemilikan sebagai variabel independen, (2) periode tahun pada penelitian ini yaitu tahun 2018-2023 sedangkan periode tahun pada penelitian yang dilakukan oleh Arohmah et al., (2019) yaitu tahun 2016. Alasan dipilihnya perusahaan CGPI sebagai objek penelitian dikarenakan CGPI merupakan hasil penilaian dan

pemeringkatan terhadap penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Sehingga diasumsikan dapat merepresentasikan sampel yang diambil pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Leverage terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan yang mengikuti *Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards* dan Terdaftar di BEI Periode 2018-2023)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Tax Avoidance adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sadar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah berupa *grey area*, yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan mengurangi atau memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Investor sebagai principal beranggapan bahwa penghindaran pajak ini adalah praktik melanggar undang – undang perpajakan dan diduga menimbulkan biaya lain – lain seperti biaya yang timbul akibat pemeriksaan pajak.

Berdasarkan sumber data yang telah diolah, bahwa rata – rata *ETR* perusahaan yang terdaftar dalam *CGPI Awards* memiliki kadar praktik *Tax Avoidance* yang tinggi sebagaimana tersaji pada gambar 1.1. bahwa perusahaan yang terdaftar dalam *CGPI Awards* memiliki nilai *ETR* dibawah 1

(satu). Beberapa diantaranya yaitu, PT Bakrie & Brothers Tbk di tahun 2017, 2018 dan 2020 sedang gencar – gencarnya melakukan praktik pengindaran pajak yang tercermin dari nilai ETR nya sebesar 0,021 jauh dibawah angka 1(satu). Kemudian di tahun 2017 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai ETR sebesar 0,071. Selanjutnya , PT PP Properti Tbk di tahun 2019 dan 2020 pun juga mempunyai nilai ETR sebesar 0,003 dan 0,01. Serta masih banyak lagi perusahaan – perusahaan yang memiliki nilai ETR jauh dari angka 1 (satu). Padahal, sebagai perusahaan yang terdaftar di *CGPI Awards* seharusnya mampu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya yaitu harus transparan dalam menyajikan laporan keuangannya. Selain itu, pasti ada faktor-faktor yang diduga mampu mempengaruhi tingginya praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan, baik itu dari pihak internal maupun eksternal.

Dimana dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti yaitu pengaruh *Corporate Governance*, Struktur kepemilikan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas latar belakang diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut ini :

1. Sejauh mana *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Sejauh mana Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Sejauh mana *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk menguji, memperoleh bukti empiris dan menganalisa mengenai :

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

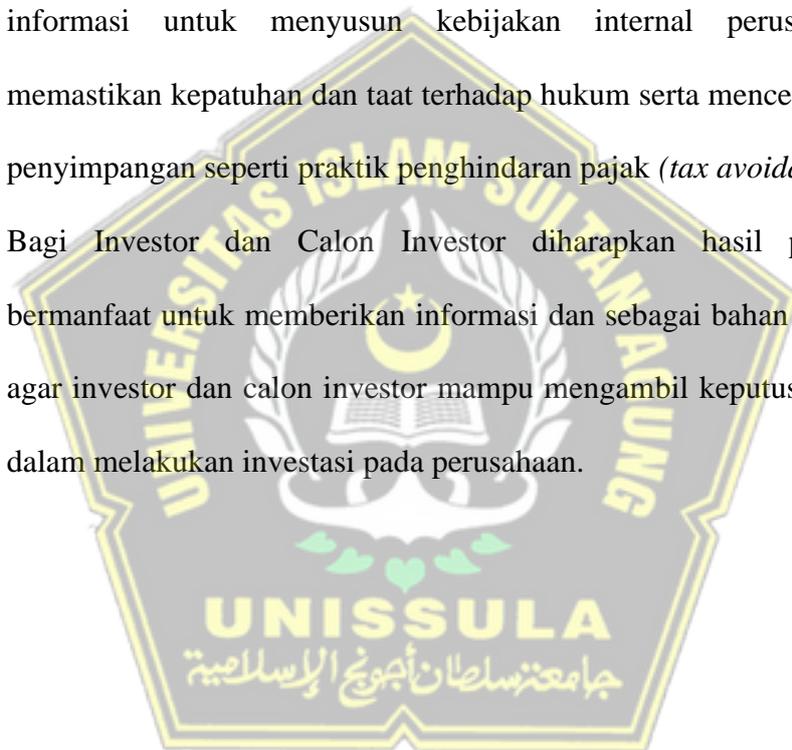
1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu khususnya mengenai *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan *Tax Avoidance* dengan baik sehingga dapat menghindari praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
 - b. Bagi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai bahan acuan atau perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, *Leverage*, dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak, informasi ini dapat digunakan untuk memutuskan suatu kebijakan atau peraturan yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak badan.
- b. Bagi Perusahaan, penilitan ini dapat menjadikan acuan pertimbangan dan informasi untuk menyusun kebijakan internal perusahaan, guna memastikan kepatuhan dan taat terhadap hukum serta mencegah terjadinya penyimpangan seperti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- c. Bagi Investor dan Calon Investor diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan agar investor dan calon investor mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi pada perusahaan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Signal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal (*Signaling Theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Spence (1973), yang menjelaskan bahwa sender (pemilik informasi) memberikan sinyal atau isyarat berupa informasi yang mencerminkan keadaan perusahaan yang berguna bagi penerima (investor). Menurut Brigham dan Houston (2011), *signaling theory* menjelaskan persepsi manajemen terhadap pertumbuhan masa depan perusahaan, yang mempengaruhi reaksi calon investor terhadap perusahaan. Sinyal tersebut berupa informasi yang menjelaskan upaya manajemen untuk memenuhi keinginan pemilik. Informasi ini dianggap sebagai indikator penting bagi investor dan trader saat membuat keputusan investasi.

Signaling theory dapat memberikan penjelasan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal berupa laporan keuangan maupun non keuangan. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Dimana perusahaan lebih mengetahui tentang perusahaan dan prospeknya daripada pihak eksternal atau dalam hal ini investor luar dan Kreditor.

Alasan peneliti menggunakan teori sinyal ini karena berkaitan dengan variabel – variabel dalam penelitian ini. Peneliti berpendapat bahwa aksi

korporasi perusahaan memberikan makna yang berarti bagi pihak luar, Spence (1973) dalam Marfiana & Andriyanto (2021) menyebutkan bahwa informasi dalam *signalling theory* secara umum sering disebut signal negative. Namun, pihak manajemen diharapkan mampu memberikan sebuah *good signal* (sinyal baik) ataupun sinyal kemakmuran kepada stakeholdernya dalam mempublikasikan laporan keuangan, baik untuk pemilik maupun pemegang saham. Termasuk sinyal baik terkait tata kelola perusahaan-perusahaan, sinyal baik atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang mencerminkan *profitabilitasnya* serta memanfaatkan ekuitas untuk membiayai hutang - hutangnya, dan juga sinyal dilakukannya praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan karena dianggap sebagai suatu tindakan penggelapan pajak yang melanggar hukum yang dikhawatirkan mampu menurunkan minat investor.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Tax Avoidance (Y)

Menurut Kasmir (2019) *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*Tax Evation*). *Tax Avoidance* tidak melanggar undang – undang, sedangkan *Tax Evation* merupakan bentuk usaha penghindaran

pajak dengan melanggar peraturan pajak dan perundang – undangan. Praktik penghindaran pajak ini diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan sehingga berpengaruh terhadap naiknya profitabilitas perusahaan. Namun, Investor sebagai principal beranggapan bahwa penghindaran pajak ini adalah praktik melanggar undang – undang perpajakan dan diduga menimbulkan biaya lain – lain seperti biaya yang timbul akibat pemeriksaan pajak. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan.

Beberapa faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak secara ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin tinggi kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin rendah biaya yang diperlukan menyuap fiskus, semakin tinggi kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi maka semakin tinggi kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran, maka semakin tinggi kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode pengukuran. *Cash ETR* adalah *Cash Effective Tax Rate*

berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan dalam tahun berjalan. ETR (*Effective Tax Rate*) adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Gloria & Apriwenni, 2020). Dalam penelitian ini, pengukuran *Tax Avoidance* diukur menggunakan rumus ETR, menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang. Semakin kecil nilai ETR maka semakin besar praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.2.2 *Corporate Governance* (X₁)

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002). Menurut IICG (2008), konsep *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan :

1. Struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya.
2. Sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan dalam menetapkan tujuan perusahaan, pencapaian beserta dengan pengukuran kinerjanya.

Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) atau *National Committee on Governance* menerbitkan *Indonesia's Code of Good Corporate Governance* sebagai panduan dasar bagi perusahaan dengan menyediakan referensi dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* atau GCG guna menjalankan usahanya sehingga menjamin kelangsungan jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas, meskipun tidak bersifat regulasi (KNKG, 2012). Dalam KNKG (2012), disebutkan terdapat tiga pilar yang menyokong implementasi GCG, yaitu:

1. Regulator, supervisor, dan otoritas penyelenggara peraturan hukum dan regulasi berperan dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan dan menjaga serta mendukung penerapan hukum yang konsisten.
2. Sektor bisnis sebagai pelaku pasar yang menerapkan prinsip GCG sebagai dasar menjalankan kegiatan usahanya.

3. Publik sebagai konsumen produk dan jasa dari sektor bisnis serta sebagai pihak yang terdampak dari keberadaan perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap hal ini.

Dalam *Corporate Governance*, terdapat lima unsur penting yang perlu diperhatikan (FCGI, 2001). Unsur-unsur tersebut diantaranya :

1. *Fairness*, menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, serta memastikan komitmen para investor terpenuhi.
2. *Transparancy*, mengharuskan penyediaan informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan mengenai kondisi keuangan, manajemen, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability*, menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung upaya untuk menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sesuai dengan pengawasan dewan komisaris.
4. *Responsibility*, menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dari kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial.
5. *Independency*, menunjukkan pengelolaan Perusahaan yang profesional tanpa adanya konflik kepentingan atau tekanan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang

saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait lainnya. Sembilan dimensi corporate governance yang menjadi acuan penilaian yang dilakukan oleh *IICG* meliputi komitmen terhadap tata kelola perusahaan, tata kelola dewan komisaris, komite-komite fungsional, dewan direksi, transparansi, perlakuan terhadap pemegang saham, peran pihak berkepentingan lainnya, integritas, dan independensi.

a) *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2000, adalah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia. Lembaga ini terutama melaksanakan riset mengenai penerapan *Good Corporate Governance* yang hasilnya berupa *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah riset dan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penilaian *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan public menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* diselenggarakan setiap tahun sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2001 dan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* menjalin kerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG). Penilaian dan aspek yang diukur dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah pengembangan alat ukur yang dimiliki *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG), pedoman dan prinsip *Good Corporate Governance* yang diterbitkan OECD dari berbagai sumber, serta perangkat hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Metodologi riset yang digunakan mencakup empat tahapan riset yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal stakeholders perusahaan. Salah satu indikator *Corporate Governance* di Indonesia adalah hasil dari *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG). Secara umum emiten baru bersedia mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) jika *Tax Avoidancenya* relatif baik dan tidak sedang mengalami permasalahan yang bersifat material dalam penyajian laporan keuangan sehingga emiten tersebut memiliki rasa percaya diri yang cukup untuk menjalani survey tersebut. Perusahaan yang tercatat dengan skor pemeringkatan *Corporate Governance* terbukti telah menerapkan tata kelola yang baik dan secara langsung meningkatkan nilai sahamnya. Hasil dari program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah penilaian dan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) meliputi empat tahapan tersebut dengan bobot nilai yang berbeda. Empat tahapan tersebut *Self Assessment*, pengumpulan dokumen perusahaan, penyusunan

makalah dan prestasi serta observasi ke perusahaan. Pemeringkatan *Corporate Governance Index (CGPI)* didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kepercayaan yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan yaitu sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya.

2.2.3 Struktur Kepemilikan (X₂)

Struktur kepemilikan adalah jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan yang umum dijumpai adalah kepemilikan individual, kepemilikan oleh institusi tertentu baik itu pemerintah maupun institusi swasta, serta kepemilikan asing (Andriyanto Toto & Marfian Andri, 2021).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan bisa dijadikan dasar penerapan corporate governance yang nantinya akan dapat meminimalisir masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Ini dikarenakan struktur kepemilikan perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap operasional perusahaan serta proses pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan manajemen perusahaan.

Ada dua karakter struktur kepemilikan perusahaan yang ada. Karakter kepemilikan tersebut adalah kepemilikan yang menyebar (dispersed ownership) dan kepemilikan yang terkonsentrasi (closely held). Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar akan cenderung memberikan imbalan yang lebih besar pada pihak manajemen dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi (Gilberg dan Idson, 1995). Sedangkan dengan kepemilikan yang

terkonsentrasi akan timbul dua kelompok pemegang saham yaitu pemilik mayoritas yang mengendalikan perusahaan (*controlling interest*) dan pemilik minoritas (*minority interest*).

Selain karakter dari kepemilikan perusahaan, terdapat pula jenis-jenis struktur kepemilikan perusahaan. Jenis-jenis struktur kepemilikan perusahaan tersebut antara lain:

1. Kepemilikan manajerial, merupakan kepemilikan perusahaan oleh manajemen perusahaan itu sendiri.
2. Kepemilikan institusional, merujuk pada kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah ataupun institusi-institusi lainnya.
3. Kepemilikan asing, merupakan kepemilikan perusahaan oleh investor luar negeri atau investor asing.

Berbagai jenis serta karakter struktur kepemilikan perusahaan ini diyakini akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap tingkat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan otorisasi atau akses yang didapat pemilik perusahaan akan berbeda tergantung dari karakter kepemilikan perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan di proyeksi kan dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain Kiryanto & Amilahaq (2021). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen serta bertindak sebagai pihak yang memonitor aktivitas perusahaan. Jensen dan

Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Bathala dkk (1994) menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol biaya keagenan.

2.2.4 Leverage (X₃)

Leverage adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Fahmi, 2020). Perusahaan yang mempunyai aktiva/kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya disebut perusahaan yang *solvable*, sedang yang tidak disebut *insolvable*. Perusahaan yang *solvable* tidak menjamin likuid, demikian juga sebaliknya yang *insolvable* tidak menjamin likuid. Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Selain itu besarnya beban hutang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan.

Tingkat rasio leverage yang besar menimbulkan keraguan akan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang sehingga dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Manfaat leverage ratio menurut (Kasmir, 2019), yaitu:

- a. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain.
- b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman beserta bunganya.
- c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, terutama aktiva tetap dengan modal.
- d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang
- f. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera jatuh tempo dibandingkan dengan modal sendiri.

Debt to equity ratio (DER) merupakan salah satu rasio untuk mengukur *leverage*, dimana DER membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2019). Semakin tinggi nilai DER berarti semakin sedikit modal sendiri dibandingkan dengan jumlah utang yang harus dibayarkan. Sedangkan semakin rendah nilai DER berarti porsi utang terhadap modal sendiri semakin rendah sehingga kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi aman.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Arohmah et al.,	Variabel Penelitian :	- GCG berpengaruh positif

(2019)	<p><i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> <p><i>Good Corporate Governance</i> (X1)</p> <p><i>Leverage</i> (X2)</p> <p>Sampel :</p> <p>Perusahaan yang terdaftar dalam pemeringkatan CGPI tahun 2016</p> <p>Metode Analisis :</p> <p>Regresi linier berganda.</p>	<p>terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
2	<p>Arviyanti & Muiz (2018)</p> <p>Variabel Penelitian :</p> <p><i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> <p>Karakteristik Perusahaan (X1)</p> <p>Struktur Kepemilikan (X2)</p> <p>Sampel :</p> <p>Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2013-2016</p> <p>Metode Analisis :</p> <p>Regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas (ROA) dan <i>Size</i> berpengaruh negative signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - <i>Leverage</i> (DER) dan CIR berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan institusi berpengaruh negative signifikan. - Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	<p>Ikraam & Arianto (2020)</p> <p>Variabel Penelitian :</p> <p>Penghindaran Pajak (Y)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Asing berpengaruh negatif

		Struktur Kepemilikan Asing (X1) Intensitas Modal (X2) Sampel : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 Metode Analisis : Regresi linier berganda	terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Intensitas Modal berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4	Lolyta & Hutabarat (2020)	Variabel Penelitian : <i>Tax Avoidance</i> (Y) <i>Corporate Governance</i> (X1) Likuiditas (X2) Sampel : Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019 Metode Analisis : Regresi linier berganda	- <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5	Mita Dewi (2019)	Variabel Penelitian : <i>Tax Avoidance</i> (Y) Kepemilikan Institusional (X1) Dewan Komisaris Independen (X2) Komite Audit (X3) Sampel : Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 Metode Analisis : Regresi linier berganda	- Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - Dewan Komisaris Independen berpengaruh negative terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6	Nabilla & Fikri (2018)	Variabel Penelitian : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	- Resiko Perusahaan, <i>Leverage</i> dan

		<p>Resiko Perusahaan (X1) <i>Leverage</i> (X2) Pertumbuhan Penjualan (X3) Sampel : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017 Metode Analisis : Regresi linier berganda</p>	<p>Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
7	Nurmawan (2022)	<p>Variabel Penelitian : Penghindaran Pajak (Y) Kepemilikan Asing (X1) Kepemilikan Institusional (X2) Kepemilikan Manajerial (X3) Sampel : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 Metode Analisis : Regresi linier berganda</p>	<p>- Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
8	Ratnasari & Nuswantara (2020)	<p>Variabel Penelitian : <i>Tax Avoidance</i> (Y) Kepemilikan Institusional (X1) <i>Leverage</i> (X2) Sampel : Perusahaan disektor industri manufaktur periode 2014-2017 Metode Analisis :</p>	<p>- Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. - <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>

		Regresi linier berganda	
9	Rozan et al., (2023)	<p>Variabel Penelitian :</p> <p>Penghindaran Pajak (Y)</p> <p>Kepemilikan Manajerial (X1)</p> <p>Kepemilikan Institusional (X2)</p> <p><i>Capital Intensity</i> (X3)</p> <p>Sampel :</p> <p>Perusahaan manufaktur & pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019</p> <p>Metode Analisis :</p> <p>Regresi linier berganda</p>	<p>- Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan <i>Capital Intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
10	Setyawan (2021)	<p>Variabel Penelitian :</p> <p><i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> <p><i>Corporate Social Responsibility</i> (X1)</p> <p><i>Good Corporate Governance</i> (X2)</p> <p>Sampel :</p> <p>Perusahaan peraih CGPI yang terdaftar di IICG tahun 2018</p> <p>Metode Analisis :</p> <p>Regresi linier berganda</p>	<p>- <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negative terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>- <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
11	Wahyuni & et al., (2019)	<p>Variabel Penelitian :</p> <p>Penghindaran Pajak (Y)</p> <p><i>Leverage</i> (X1)</p> <p><i>Return On Assets</i> (X2)</p> <p>Ukuran Perusahaan (X2)</p> <p>Sampel :</p> <p>Perusahaan Food and Beverage</p>	<p>- <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>- <i>Return On Assets</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>- Ukuran Perusahaan</p>

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018	berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Metode Analisis :	
Regresi linier berganda	

Sumber : Berbagai sumber yang dirangkum

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut IICG (2008), konsep corporate governance dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Terkait teori sinyal, penerapan *Corporate Governance* seharusnya mampu menjadi sinyal baik perusahaan bagi para investor, karena mereka menilai perusahaan dengan tata kelola yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melaporkan informasi keuangannya meliputi diantaranya unsur *Fairness*, *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* sebagaimana standart yang harus dimiliki perusahaan dengan *Corporate Governance* yang baik. Dengan adanya *Corporate Governance* sistem pengawasan sebuah perusahaan akan meningkat. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *Corporate Governance* mereka belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Mereka belum mampu menerapkan *Corporate Governance* secara efisien dan tepat sehingga diharapkan dapat meminimalisir peluang dan dorongan bagi manajemen

untuk melakukan suatu kecurangan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak (Purbowati, 2021).

Tata kelola perusahaan yang sering kali mejadi bahan pertimbangan investor ketika hendak mengambil keputusan. Sedangkan, banyaknya minat investor tentu akan berdampak pada stabilnya siklus keuangan perusahaan, khususnya terkait ekuitas dan laba perusahaan (Rosiana & Mahardika, 2020). Sebaliknya, buruknya tata kelola perusahaan dikhawatirkan mampu menurunkan nilai perusahaan ataupun minat investor yang diikuti menurunnya laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* dengan baik secara otomatis mampu meningkatkan laba perusahaan (Gholy & Nadya, 2020). Namun, bertambahnya laba perusahaan juga berbanding lurus dengan meningkatnya beban pajak perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun ikut meningkat, sehingga perusahaan cenderung memilih cara dengan melakukan praktik *Tax Avoidance* guna mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, semakin baik *Corporate Governance* perusahaan, nilai ETR cenderung tinggi yang artinya tata kelola yang baik berpotensi menurunkan kadar aktivitas *Tax Avoidance* di perusahaan tersebut.

Penelitian Setyawan (2021) dan Arohmah et al., (2019) menyebutkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis peneletian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : *Corporate Governcance* berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Choirul et al., (2020) Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan yang umum dijumpai adalah kepemilikan individual, kepemilikan oleh institusi tertentu baik itu pemerintah maupun institusi swasta, serta kepemilikan asing. Dimana kepemilikan institusional ini berasal dari pihak institusi, bank, asuransi, dan pihak investasi lainnya dan dapat memonitor kinerja manajemen serta dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Proporsi kepemilikan istitusional yang besar dapat meningkatkan usaha pengawasan oleh pihak institusi sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer dan dapat membantu pengambilan keputusan perusahaan, salah satunya keputusan terkait kinerja perusahaan yang erat kaitannya dengan laba dan beban/hutang perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Kemudian sehubungan dengan teori sinyal, kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja manajemen sehingga hal ini menjadi sinyal positif. Keberadaan investor dalam kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen untuk melakukan kebijakan pengefesiensian tarif pajak dalam memperoleh keuntungan yang maksimal (Fadillah et al., 2023). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan (Marfiana et al, 2021). Semakin kuat kendali yang dilakukan pemilik institusional,

maka semakin mengurangi perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurangan/penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak. Semakin tingginya proporsi yang dimiliki kepemilikan institusional akan semakin agresif dalam meminimalkan pelaporan pajaknya (Murtina et al., 2022), karena adanya tanggung jawab perusahaan dengan melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Namun, dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tidak akan melakukan kecurangan/penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak. Tingginya nilai ETR mencerminkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tergolong kecil.

Penelitian Nurmawan (2022) dan Mita Dewi (2019) menyebutkan struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage diukur menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER) yang menunjukkan perbandingan total jumlah hutang terhadap ekuitas. Perusahaan yang mempunyai aktiva/kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-

hutangnya disebut perusahaan yang solvable, sedang yang tidak disebut insolvable.

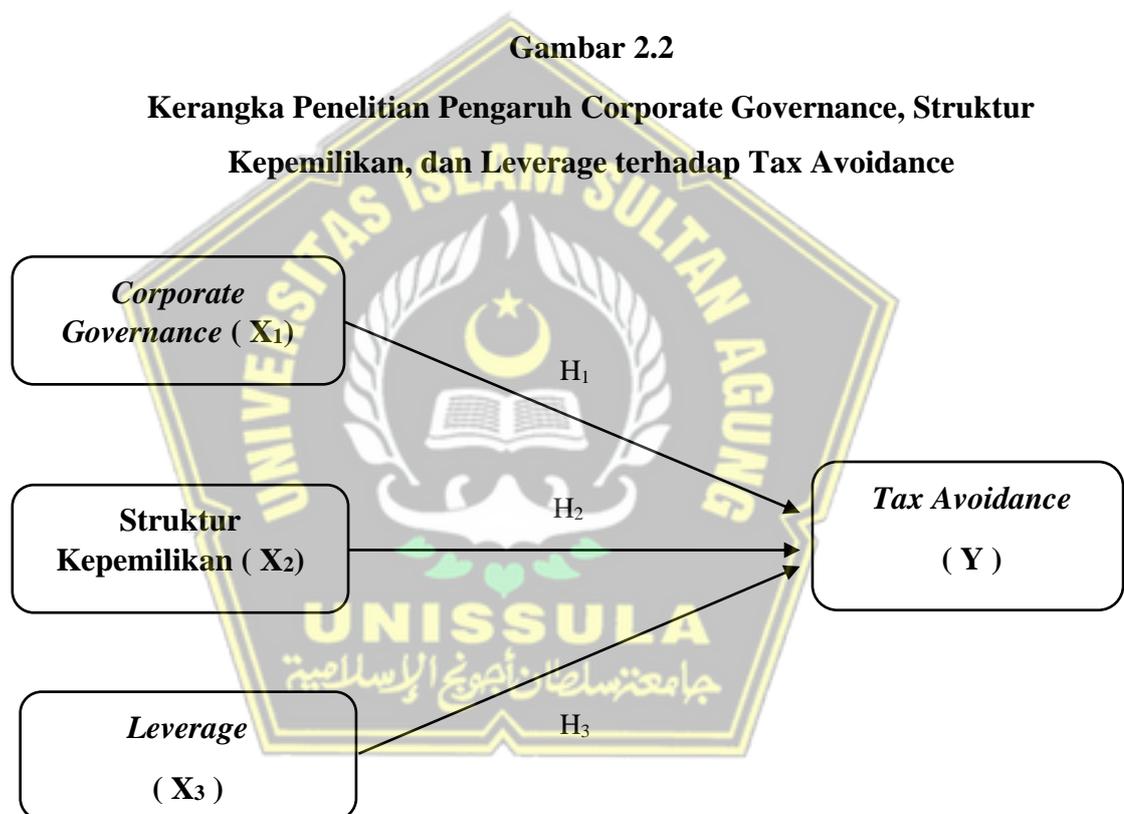
Sehubungan dengan teori sinyal, nilai DER yang kecil merupakan sinyal positif, *karena* perusahaan dianggap mampu dalam membiayai hutang – hutangnya dengan memanfaatkan ekuitas yang ada. Jika utang tersebut dikelola dengan baik dan digunakan untuk proyek investasi yang produktif. Namun sebaliknya, apabila nilai DER semakin besar, itu artinya beban hutang yang ditanggung perusahaan tergolong tinggi Wahyudi (2020). Perusahaan yang mempunyai beban hutang lebih besar akan memiliki tarif pajak yang lebih rendah, yang secara otomatis mampu mengurangi pembayaran beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu berupaya keras melakukan manipulasi pencatatan beban pajak atau praktik dilakukannya *Tax Avoidance* cenderung lebih kecil (Wahyuni et al., 2019). Oleh karena itu, semakin tinggi DER, maka semakin tinggi nilai ETR yang artinya kadar dilakukannya praktik *Tax Avoidance* di perusahaan tersebut tergolong kecil.

Penelitian Arohmah et al., (2019) dan Nabilla & Fikri (2018) menyebutkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance*.

2.5 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dilihat kerangka pemikiran adalah faktor-faktor yang diduga mampu memengaruhi *Tax Avoidance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* serta variabel independen yang terdiri dari *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan dan *Leverage*. Berikut gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak menguji pengaruh *Corporate Governance*, struktur kepemilikan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan yang mengikuti *CGPI Awards* dan terdaftar di BEI periode 2018-2023. Berdasarkan uraian kerangka penelitian diatas, maka peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang mengikuti *CGPI Awards* dan terdaftar di BEI periode 2018-2023.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan

metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan peneliti. Alasan digunakannya metode *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah karena tidak semua sampel memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Oleh karena itu, pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang mengikuti *CGPI Awards* dan terdaftar di BEI periode 2018-2023.
2. Perusahaan *CGPI Awards* yang menerbitkan laporan keuangan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode penelitian yaitu tahun 2018 – 2023.
3. Perusahaan *CGPI Awards* yang menyajikan laporan keuangan dan laporan tahunan dalam mata uang rupiah selama periode tahun 2018 – 2023.
4. Memiliki kelengkapan informasi yang di butuhkan penelitian terkait dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung terkait data yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, misalnya melalui jurnal, penelitian terdahulu ataupun laporan keuangan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) berupa

laporan keuangan auditan dan laporan tahunan auditan tahun 2018 – 2023 serta data skor Perusahaan *CGPI Awards* tahun 2018 – 2023 yang diperoleh dari IICG.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia dalam situs www.idx.co.id serta data Perusahaan *CGPI Awards* yang diperoleh dari IICG melalui permintaan data via email secretary@iicg.org.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen (*Y*) adalah *Tax Avoidance*. Kasmir (2019) menjelaskan *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penggunaan ETR dalam penelitian ini karena diharapkan dapat membantu mengevaluasi seberapa besar beban pajak sebenarnya yang dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan laba yang mereka hasilkan, sehingga ETR dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin

besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil (Kurniyawati et al., 2023). Menurut Kasmir (2019) pengukuran *Tax Avoidance* dapat menggunakan rumus ETR sebagai berikut :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}} \times 100\%$$

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini ada beberapa variabel independen, diantaranya sebagai berikut :

1) *Corporate Governance*

Menurut IICG (2008), konsep *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). *Corporate Governance* dapat diukur dengan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* merupakan riset dan pemeringkatan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penyelenggaraan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Penilaian *Corporate*

Governance Perception Index (CGPI) meliputi empat tahapan tersebut dengan bobot nilai yang berbeda. Hasil penilaian program CGPI yaitu dengan cara menggunakan norma-norma penilaian yang berdasarkan rentang nilai yang dicapai oleh peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi GCG.

Tabel 3.1
Index Penilaian GCGI menurut IICG

Nilai	Skor	Predikat
85,00 – 100,00	3	Sangat Terpercaya
70,00 – 84,99	2	Terpercaya
55,00 – 69,99	1	Cukup Terpercaya

Index penilaian CGPI menurut IICG tersebut terdiri 3 aspek dan indikator penilaian yang terdiri dari :

1. Struktur Governansi (*Governance Structure*)

Aspek struktur governnansi merupakan penilaian terhadap kelengkapan struktur dan infrastruktur perusahaan dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi.

Indikator penilaian dari aspek struktur governansi meliputi :

- a. Pemegang Saham
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Penanggung Jawab Manajemen Fungsional

2. Proses Governansi (*Governance Proses*)

Aspek proses governansi merupakan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi.

Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi :

- a. Indikator Governansi Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan RUPS
 - b. Indikator Governansi Dewan Komisaris dan Direksi
 - c. Indikator Governansi Perilaku Keorganisasian
 - d. Indikator Governansi Pengawasan Internal dan Eksternal
 - e. Indikator Governansi Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
 - f. Indikator Governansi Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan
 - g. Indikator Governansi Ekosistem Bisnis
 - h. Indikator Governansi Sumber Daya
3. Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari governansi korporat serta penguatan platform bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip governansi.

Indikator penilaian dari aspek hasil governansi ini meliputi :

- a. Indikator Kinerja Bisnis
- b. Indikator Kinerja Keuangan
- c. Indikator Kinerja Ekosistem Bisnis

2) Struktur Kepemilikan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan bisa dijadikan dasar penerapan corporate governance yang nantinya akan dapat meminimalisir masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Ini dikarenakan struktur kepemilikan perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap operasional perusahaan serta proses pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan manajemen perusahaan. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan di proyeksikan dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain Kiryanto & Amilahq (2021). Menurut Kasmir (2019) kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Total Saham}} \times 100\%$$

3) Leverage

Leverage adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Fahmi, 2020). *Debt Equity Rasio* (DER) merupakan salah satu rasio untuk mengukur *Leverage*, dimana DER membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2019). Semakin tinggi nilai DER berarti semakin sedikit modal sendiri dibandingkan dengan jumlah utang yang harus dibayarkan. Sedangkan semakin rendah nilai DER berarti porsi utang terhadap modal sendiri semakin rendah sehingga kondisi

keuangan perusahaan dalam kondisi aman. Adapun rumus DER adalah sebagai berikut :

$$Debt\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aktiva} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Operasional	Indikator	Sumber
1	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Tax avoidance</i> merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.	<i>Effective Tax Rate</i> = $\frac{Total\ Tax\ Expenses}{Pre\ Tax\ Income} \times 100\%$	(Kasmir, 2019)
2	<i>Corporate Governance</i> (X ₁)	Menurut IICG (2008), konsep <i>Corporate Governance</i> dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang	Kategori Penilaian : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 55,00 - 69,99 = Skor 1 (Cukup Terpercaya) ▪ 70,00 sampai 84,99 = Skor 2 (Terpercaya) 	IICG (2008)

		mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ $85,00 - 100 = \text{skor } 3$ (Sangat Terpercaya) 	
3	Struktur kepemilikan (X ₂)	Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.	<p>Kepemilikan Institusional =</p> $\frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Total Saham}} \times 100\%$	(Kasmir, 2019)
4	Leverage (X ₃)	Leverage adalah rasio yang menunjukkan kemampuan	$\text{Debt Equity Ratio} =$	(Kasmir, 2019)

	perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi.	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	
--	--	--	--

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari jumlah data, range, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, variance, skewness (kemiringan distribusi), kurtosis dari sampel penelitian (Ghozali, 2020). Penyajian statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau pemahaman terkait karakteristik hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian diantaranya : *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan *Tax Avoidance*.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini bertujuan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari kemungkinan estimasi yang bias. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan empat uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan nantinya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik (Ghozali, 2020). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov*, dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significanted*), yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi dikatakan normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi dikatakan tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji sejauh mana terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Indikator model regresi yang baik ditandai dengan tidak ditemukannya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2020). Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Ghozali (2020) mengungkapkan, cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari beberapa hal indikator berikut :

1. Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas.
3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari : *tolerance value* dan lawannya yakni, *Variance Inflation Faktor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Tolerance value* < 0,10 atau $VIF > 10$: terjadi multikolinearitas.
 - Tolerance value* > 0,10 atau $VIF < 10$: tidak terjadi multikolinearitas

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji sejauh mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2020). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Pengujian heteroskedastisitas

dapat dilakukan dengan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan uji Glejser yaitu:

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai signifikansi $\alpha > 0,05$.
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji sejauh mana dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi apabila penyimpangan pada periode $t-1$ (sebelumnya) atau terjadi korelasi diantara kelompok observasi yang diurutkan menurut waktu (pada data time series) (Ghozali, 2020). Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS, dengan menggunakan uji Durbin-Watson, yakni membandingkan nilai $D-W$ dengan nilai d dari tabel Durbin Watson :

- Jika $D-W < d_L$, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi positif
- Jika $D-W > (4 - d_L)$, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi negative.
- Jika $d_U < D-W < (4 - d_U)$, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi

- Jika : $d_L \leq D-W \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq D-W \leq (4 - d_L)$, berarti tidak ada kesimpulan

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi dengan tujuan meramal nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan mencari kemungkinan kesalahan serta menganalisa hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun parsial. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji Sejauh mana variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Pengujian analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Ghozali (2020) mengungkapkan analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_1 = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y_1 = Variabel dependen (*Tax Avoidance*)

a = Bilangan Konstanta

b_1-b_3 = Koefisien regresi

X_1 = *Corporate Governance*

X_2 = Struktur Kepemilikan

X_3 = *Leverage*

e = *Error*

3.6.4 Pengujian Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R_2)

Uji koefisien determinasi (R_2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2020). Sehingga dalam penelitian ini, uji R_2 nantinya akan menjelaskan seberapa besar kemampuan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R_2 mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen disebut rendah, begitupun sebaliknya. Pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS.

2) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji f bertujuan untuk menggambarkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2020). Uji F biasa disebut dengan *Analysis of varian (ANOVA)*. Ketentuan hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Uji F pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H_a diterima apabila : *signifikansi F* > 0,05, yang artinya variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen.

- H_0 ditolak apabila : *signifikasnsi* $F < 0,05$, yang artinya pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2020). Uji T pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Pengujian signifikansi parsial (Uji t) memiliki tujuan teruntuk melakukan pengujian seberapa jauh variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara parsial / individual.

1. Pengujian Hipotesis:

$H_0 : \beta_i = 0$, berarti keseluruhan variabel bebas parsial bukanlah penjelas signifikan pada variabel terikat.

$H_a : \beta_i \neq 0$, berarti keseluruhan variabel bebas secara parsial menjelaskan signifikan pada variabel terikat.

2. Tingkat Signifikansi

Pengujian t bisa ditinjau dengan angka nilai signifikansi dari tiap variabel bebas. Pada penelitian ini, peneliti mempergunakan standard $\alpha = 5\%$ (0,05).

3. Kriteria pengambilan keputusan

a) Apabila probabilitas t hitung $< 5\%$ (0,05), artinya H_0 tidak diterima dan H_a diterima, yang artinya terdapat keberpengaruhan yang signifikan parsial diantara variabel bebas pada variabel terikat dependen.

b) Apabila probabilitas t hitung $> 5\%$ (0,05), artinya H_0 diterima dan H_a

tidak diterima, yang artinya tidak terdapat keberpengaruhannya yang signifikan parsial antara variabel bebas pada variabel terikat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu mengenai perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2023. Pemilihan obyek penelitian pada perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Struktur Kepemilikan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Sedangkan pemilihan ruang lingkup perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu karena BEI merupakan bursa efek atau pasar modal yang terbesar di Indonesia. BEI juga menyajikan data yang *representative* mengenai perusahaan yang terdaftar sehingga dapat menggambarkan value perusahaan yang dapat dinilai oleh investor.

Periode waktu penelitian ini adalah tahun 2018-2023. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan data laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website perusahaan. Data perusahaan yang terdaftar dalam penilaian CGPI pada tahun 2018-2023 yang dilakukan oleh IICG diperoleh dari penyelenggara penilaian CGPI melalui permintaan data via email.

4.2 Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan terdaftar pada BEI tahun 2018-2023. Perusahaan yang ikut serta dalam pemeringkat CGPI berbeda tiap tahunnya. Deskripsi dalam pengambilan sampel di bawah ini disajikan per tahun karena untuk menunjukkan jumlah perusahaan yang ikut serta dalam pemeringkatan CGPI, berikut penjelasannya :

Tabel 4.1
Deskripsi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan					TOTAL	
		2018	2019	2020	2021	2022		2023
1	Perusahaan yang mengikuti <i>CGPI Awards</i> dan mendapat predikat sebagai perusahaan “Terpercaya”, “Sangat Terpercaya”, “Cukup Terpercaya” pada periode tahun 2018-2023	38	35	29	32	34	37	205
2	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI	(25)	(23)	(20)	(23)	(25)	(26)	(142)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan secara konsisten dan lengkap di BEI dan/atau website perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
4	Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2018-2023	(1)	(1)	(2)	-	-	(1)	(5)
Jumlah Data Perusahaan yang dapat dijadikan sampel							58	

Jumlah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI Awards tahun 2018 adalah 38 perusahaan, dari jumlah tersebut perusahaan yang tidak terdaftar di BEI sebanyak 25 perusahaan dan terdapat 1 perusahaan yang mengalami

kerugian. Sehingga jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian pada tahun 2018 yaitu 12 perusahaan. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI adalah 35 perusahaan, dari jumlah tersebut perusahaan yang tidak terdaftar di BEI sebanyak 23 perusahaan dan terdapat 1 perusahaan yang mengalami kerugian. Sehingga jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian pada tahun 2019 yaitu 11 perusahaan. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI adalah 29 perusahaan, dari jumlah tersebut perusahaan yang tidak terdaftar di BEI sebanyak 20 perusahaan dan terdapat 2 perusahaan yang mengalami kerugian. Sehingga jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian pada tahun 2020 yaitu 7 perusahaan. Tahun 2021, jumlah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI adalah 32 perusahaan, dari jumlah tersebut perusahaan yang tidak terdaftar di BEI sebanyak 23 perusahaan. Sehingga jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian pada tahun 2021 yaitu 9 perusahaan. Berikutnya tahun 2022, jumlah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI adalah 34 perusahaan, dari jumlah tersebut perusahaan yang tidak terdaftar di BEI sebanyak 25 perusahaan. Sehingga jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian pada tahun 2022 yaitu 9 perusahaan. Sedangkan tahun 2023, jumlah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI adalah 37 perusahaan, dari jumlah tersebut perusahaan yang tidak terdaftar di BEI sebanyak 26 perusahaan dan terdapat 1 perusahaan yang mengalami kerugian. Sehingga jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian pada tahun 2023 yaitu 10 perusahaan. Jadi total

jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian tahun 2018-2023 yaitu sebanyak 58 perusahaan.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan deskripsi data dari variabel pada model penelitian yang dapat dilihat dari mean, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum. Hasil analisis statistik deskriptif dari indikator CGPI, KINS, DER dan ETR disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CGPI	58	,720	,952	,88167	,051756
KINS	58	,059	1,000	,67793	,156445
DER	58	,233	,890	,69433	,211946
ETR	58	,009	,929	,23128	,140425
Valid N (listwise)	58				

Sumber : hasil output olah data SPSS versi 25, 2024

Berdasarkan dari pada Tabel 4.2 diatas dapat diketahui N atau jumlah total data sampel sebanyak 58 data. Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil perhitungan uji statistik deskriptif variabel *Corporate Governance* yang di proksikan dengan CGPI memiliki nilai minimum sebesar 0,720, nilai maksimum sebesar 0,952 dengan nilai rata-rata 0,88167 dan standar deviasi sebesar 0,051756. Standar

deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa data tersebar merata.

Variabel Struktur Kepemilikan yang di proksikan dengan KINS, berdasarkan uji statistik deskriptif di atas memiliki nilai minimum sebesar 0,059, nilai maksimum sebesar 1,000 dengan rata-rata 0,67793 dan standar deviasi sebesar 0,156445. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang berarti persebaran data merata.

Variabel *Leverage* yang di proksikan dengan DER, berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas memiliki nilai minimum sebesar 0,233 dan nilai maksimum sebesar 0,890 dengan rata-rata 0,69433 dan standar deviasi 0,211946. Standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa data tersebar merata.

Variabel *Tax Avoidance* yang di proksikan dengan ETR, berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas memiliki nilai minimum sebesar 0,009 dan nilai maksimum sebesar 0,929 dengan rata-rata 0,23128 dan standar deviasi 0,140425. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang berarti persebaran data merata.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik ini dilakukan untuk mengetahui sifat data dalam penelitian yang diharapkan dapat memberikan model analisis data yang tepat dengan menggunakan regresi linear berganda.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berikut tabel hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) :

Tabel 4.3
Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,69580052
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,081
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : hasil output olah data SPSS versi 25, 2024

Hasil uji normalitas diatas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa hasil uji data berdistribusi normal dibuktikan dengan nilai p value > 0,05 yaitu sebesar 0,200.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih dari 10 menunjukkan adanya multikolinieritas (Ghozali, 2020).

Adapun hasil uji multikolinieritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Nilai Tolerance dan VIF

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	,546	,080		6,835	,000		
	CGPI	,455	,033	,818	13,774	,000	,884	1,131
	KINS	,330	,088	,353	3,733	,000	,838	1,193
	DER	,131	,056	,422	2,344	,021	,878	1,139

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : hasil output olah data SPSS versi 25, 2024

Berdasarkan hasil uji tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak terjadi masalah multikolinieritas. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada masalah multikolinieritas karena tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2020). Berikut tabel hasil uji heterokedastisitas :

Tabel 4.5
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser :

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,163	9,711		,120	,905
	CGPI	8,911	10,001	,125	,891	,377
	KINS	-2,450	3,398	-,104	-,721	,474
	DER	-4,419	2,451	-,253	-1,803	,077

Sumber : hasil output olah data SPSS versi 25, 2024

Berdasarkan hasil uji tabel 4.5 diatas menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variable independen memiliki nilai diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

4.4.4 Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji sejauh mana dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi apabila penyimpangan pada periode t-1 (sebelumnya) atau terjadi korelasi diantara kelompok observasi yang diurutkan menurut waktu (pada data time series) (Ghozali, 2020). Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS, dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,818 ^a	,669	,665	1,61075	1,935

a. Predictors: (Constant), DER , CGPI , KINS

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : hasil output olah data SPSS versi 25, 2024

Berdasarkan hasil uji tabel 4.6 menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1.935, dL sebesar 1.4692, dU sebesar 1.6860, nilai 4-dU sebesar 2.314, dan nilai

4-dL sebesar 2.5308. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai $d_U < D-W < (4 - d_U)$ atau $1.6860 < 1.935 < 2.314$ yang artinya tidak terdapat autokolerasi.

4.5 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang meliputi *Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap variabel dependen *Tax Avoidance*. Berikut tabel hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu tentang pengaruh CGPI, KINS, DER terhadap ETR :

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,546	,080		6,835	,000		
	CGPI	,455	,033	,818	13,774	,000	,884	1,131
	KINS	,330	,088	,353	3,733	,000	,838	1,193
	DER	,131	,056	,422	2,344	,021	,878	1,139

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : hasil output olah data SPSS versi 25, 2024

Dari hasil perhitungan regresi linear berganda pada tabel 4.7 diatas, dapat diketahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_1 = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$\text{Tax Avoidance (ETR)} = 0,546 + 0,455 \text{ CGPI} + 0,330 \text{ KINS} + 0,131 \text{ DER}$$

Dimana :

- d. Nilai Konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 0,546. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan jika CGPI, KINS, dan DER nilainya konstan atau tidak mengalami perubahan, maka ETR akan mengalami peningkatan sebesar 54,6%.
- e. Nilai koefisien regresi CGPI (X_1) menunjukkan nilai positif sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan jika CGPI mengalami kenaikan 1% maka ETR akan naik sebesar 45,5% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- f. Nilai koefisien regresi KINS (X_2) menunjukkan nilai positif sebesar 0,330. Hal ini menunjukkan jika KINS mengalami kenaikan 1% maka ETR akan naik sebesar 33% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- g. Nilai koefisien regresi DER (X_3) menunjukkan nilai positif sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan jika DER mengalami kenaikan 1% maka ETR akan naik sebesar 13,1% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji t (Parsial)

Uji t memiliki tujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas/independen dapat menerangkan variabel terikat / dependen secara parsial / individual. Berdasarkan tabel 4.7 diatas hasil analisa uji t penelitian ini sebagai berikut :

- Variabel *Corporate Governance* (CGPI) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,774 > 2,005$) dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa CGPI mempunyai dampak positif terhadap ETR (*Tax Avoidance*) sebab nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance* “**diterima**”.
- Variabel Kepemilikan Institusional (KINS) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,733 > 2,005$) dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional mempunyai dampak positif terhadap ETR (*Tax Avoidance*) sebab nilai signifikansi $< 0,05$. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance* “**diterima**”.
- Variabel *Leverage* (DER) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,344 > 2,005$) dengan nilai signifikansi 0,021. Hasil ini menunjukkan bahwa *Leverage* mempunyai dampak positif terhadap ETR (*Tax Avoidance*) sebab nilai signifikansi $< 0,05$.

Dengan begitu, hipotesis yang menyebutkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance* “diterima”.

4.6.2 Uji F (Simultan)

Dalam penelitian uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel penelitian CGPI, KINS, DER terhadap ETR (*Tax Avoidance*) memiliki pengaruh secara simultan.

Tabel 4.8
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	885,212	1	885,212	26,807	,000 ^b
	Residual	1849,202	56	33,021		
	Total	1,124	57			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), DER , CGPI , KINS

Sumber : hasil output olah data SPSS versi 25, 2024

Berdasarkan hasil penelitian uji F pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 26,807 dimana lebih besar daripada F tabel 2,77 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa CGPI, KINS dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ETR (*Tax Avoidance*).

4.6.3 Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Sehingga dalam penelitian ini, uji R² nantinya akan menjelaskan seberapa besar kemampuan variabel independen berpengaruh terhadap variable dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R² mendekati 0, maka kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen disebut rendah, begitupun sebaliknya.

Tabel 4.9
Hasil Uji *Adjusted R Square*

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,818 ^a	,669	,665	1,61075

a. Predictors: (Constant), DER , CGPI , KINS

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : hasil output olah data SPSS versi 25, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat diketahui nilai adjusted R Square sebesar 0,665 atau 66,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CGPI, KINS, dan DER berpengaruh secara simultan sebesar 66,5% terhadap ETR (*Tax Avoidance*) sedangkan sisanya sebesar 33,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh *Corporate Governance* (CGPI) terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Corporate Governance* (CGPI) berpengaruh positif terhadap ETR (*Tax Avoidance*) pada perusahaan yang mengikuti CGPI Awards dan terdaftar pada BEI periode 2018-2023. Hasil uji CGPI menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya bahwa H1 diterima karena nilai sig < nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini berarti semakin tinggi nilai CGPI yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula ETR, yang artinya praktik *Tax Avoidance* cenderung rendah.

Menurut teori sinyal, praktik *Tax Avoidance* dapat dipengaruhi oleh *Corporate Governance* karena semakin baik *Corporate Governance* perusahaan, nilai ETR cenderung tinggi yang artinya tata kelola yang baik berpotensi menurunkan kadar aktivitas *Tax Avoidance* di perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tata kelola yang baik mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mematuhi peraturan, termasuk peraturan perpajakan, sehingga semakin besar pula kemungkinan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Sistem perusahaan yang dikelola dengan lebih baik dapat memberikan informasi pelaporan keuangan yang lebih lengkap, akurat, dan dapat diandalkan kepada pemegang saham. Penerapan GCG yang baik juga dapat meningkatkan pengawasan pada setiap bagian di perusahaan sehingga dapat meminimalisir tindakan penyelewengan. Dengan begitu, tim manajemen akan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil dan mampu bertanggung jawab mengelola perusahaan dengan transparan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan (2021) dan Arohmah et al., (2019) yang menyebutkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun bertolak belakang dengan penelitian Lolyta & Hutabarat (2020) yang menyebutkan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4.7.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional (KINS) berpengaruh positif terhadap ETR (*Tax Avoidance*) pada perusahaan yang mengikuti CGPI Awards dan *terdaftar* pada BEI periode 2018-2023. Hasil uji KINS menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya bahwa H2 diterima karena nilai sig < nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat Kepemilikan Institusional yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula ETR, yang artinya praktik *Tax Avoidance* cenderung rendah.

Menurut teori sinyal, kepemilikan institusional yang kuat dalam perusahaan dapat mendorong pemantauan kinerja manajemen yang lebih optimal sehingga dapat memberikan sinyal positif. Adanya investor kepemilikan institusional menunjukkan adanya tekanan terhadap pihak manajemen untuk menerapkan kebijakan terkait efisiensi tarif pajak agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pula proporsi kendali dan kontrol pihak institusional. Sehingga hal tersebut dapat membuat pihak manajemen memaksimalkan pelaporan keuangan yang baik tanpa melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak. Kehadiran kepemilikan institusional dapat mendorong pihak manajemen untuk memantau kinerja

perusahaan secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Karena kepemilikan institusional juga berperan penting sebagai pengawas dalam memonitor kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurmawan (2022) dan Mita Dewi (2019) yang menyebutkan struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun bertolak dengan penelitian Rozan et al., (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4.7.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap ETR (*Tax Avoidance*) pada perusahaan yang mengikuti *CGPI Awards* dan terdaftar pada BEI periode 2018-2023. Hasil uji DER menunjukkan nilai signifikansi 0,021 yang artinya bahwa H3 diterima karena nilai sig < nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini berarti semakin tinggi rasio *Leverage* (DER) yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula ETR, yang artinya praktik *Tax Avoidance* cenderung rendah.

Dalam kaitannya dengan teori sinyal, nilai DER yang rendah merupakan indikator yang baik karena perusahaan mampu memanfaatkan ekuitasnya untuk membiayai hutang-hutangnya. Sebaliknya, jika nilai DER semakin tinggi maka beban hutang yang ditanggung perusahaan semakin tinggi. Perusahaan dengan beban hutang yang tinggi akan membayar pajak lebih sedikit, yang secara otomatis dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan tidak

perlu mengeluarkan upaya untuk melakukan manipulasi pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi DER maka semakin tinggi pula nilai ETR yang berarti tingkat aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan tersebut rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arohmah et al., (2019) dan Nabilla & Fikri (2018) yang menyebutkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun bertolak dengan penelitian (Firmansyah & Bahri, 2023) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi empiris mengenai pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan dan Leverage terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan analisis data dan penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Corporate Governance* yang diproksikan CGPI terbukti berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa skor CGPI dapat mempengaruhi perusahaan dalam pelaksanaan praktik *Tax Avoidance*.
2. Kepemilikan institusional yang diproksikan KINS berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat KINS mampu mempengaruhi perusahaan dalam pelaksanaan praktik *Tax Avoidance*.
3. *Leverage* yang diproksikan DER terbukti berpengaruh positif terhadap nilai ETR sebagai proksi *Tax Avoidance* . Hal ini menunjukkan bahwa *Leverage* dapat mempengaruhi perusahaan dalam pelaksanaan praktik *Tax Avoidance*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen *Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* dengan nilai adjusted R Square sebesar 66,5%. Sisanya sebanyak 33,5% dipengaruhi oleh faktor lain.
2. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan yang mengikuti *Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards* sehingga data tidak dapat mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Penelitian ini membatasi periode penelitian selama 6 tahun yaitu tahun 2018-2023.

5.3 Saran

1. Penelitian berikutnya disarankan menambahkan variabel independen lain agar mendapatkan hasil model regresi yang lebih baik.
2. Penelitian berikutnya disarankan agar dapat memperluas ruang lingkup sampel perusahaan.
3. Penelitian berikutnya disarankan dapat menambah/memperpanjang durasi tahun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto Toto, & Marfian Andri. (2021). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Tax Avoidance di Indonesia dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*.
- Arohmah, H., Setyawan, S., & Wahyuni, E. D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar Dalam Peningkatan CGPI Tahun 2016). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15.
- Arviyanti, & Muiz, E. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2013-2016. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 28–46. <https://doi.org/10.37932/ja.v7i1.22>
- Choirul, N., Pratama, A., Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2020). Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(1), 130–142.
- Fadillah, A. N., Dewi, S., & Karjantoro, H. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan di BEI. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 41–55. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.62>
- Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 430–439. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>
- Gholy, P. A., & Nadya, P. S. (2020). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 108. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3265>
- Gloria, & Apriwenni, P. (2020). Effective Tax Rate dan Faktor - Faktor yang Memengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17–31. <https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.759>
- Ikraam, & Arianto. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Ikraam Fakultas Ekonomi, Universitas IBA (Ikraam07312@gmail.com) Ariyanto Fakultas Ekonomi, Universitas IBA (arinofx@gmail.com). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 10(1), 27.
- Kiryanto, R., & Amilahaq, A. (2021). Is Corporate Social Responsibility able to Mediate Increased Tax Avoidance? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 346–365. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.16470>

- Kurniyawati, I., Nurjana, F., & Rosdiyati. (2023). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Transportasi di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Indonesia*, 1(02), 37–43. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/juemi>
- Lolyta Manurung, V., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Mediasi Likuiditas Pada Perusahaan BUMN yang Terdapat di BEI Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15, 478–487.
- Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Tax Avoidance di Indonesia dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 178–196. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47–66. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>
- Nabilla, S. S., & Fikri, I. Z. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt to Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur subsektor makanan & minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4 Tahun 2018*, 27(2), 141–151.
- Noviyanti, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Nurmawan, M. N. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4, 64–76.
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal*

Akuntansi UNESA, 09(01), 1–10.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9392>

- Rosiana, A., & Mahardika, A. S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan. *Sistem Informasi Corporate Governance Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan*, 5(1), 76–89. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Rozan, N., Ariefiara, D., & Hindria, R. (2023). Struktur Kepemilikan dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol.*, 6(1), 10–22.
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152–161. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Eco-Buss*, 1.
- Wahyudi, I. (2020). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance*.
- Wahyuni, K., & et al. (2019). *Pengaruh Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia*. 2(2), 116–123.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku I*. Jakarta: Salemba Empat.

